

UPAYA UNESCO DALAM MERESPONS PERUSAKAN SITUS WARISAN BUDAYA DI UKRAINA TAHUN 2022-2025

UNESCO'S EFFORTS IN RESPONDING TO THE DESTRUCTION OF CULTURAL HERITAGE SITES IN UKRAINE IN 2022-2025

Dhiva Zayyana Syifa'un Nabilla¹, Ferdinand Arie², Yaasiinta Fajar Wulandari³,
Selvi Nur Islamiyah⁴, James Arthur Siahaya⁵, Renitha Dwi Hapsari^{6*}

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia

*Email Correspondence: renithadwi.hi@upnjatim.ac.id

Abstract

Armed conflict not only threatens human lives, but also damages infrastructure and cultural heritage as the collective identity of a nation. Russia's invasion of Ukraine has caused damage to hundreds of cultural sites of historical, religious, and social value. As the UN agency responsible for protecting cultural heritage, UNESCO is taking action to prevent further damage, document affected sites, and rally international support for restoration efforts. This study aims to analyse how UNESCO responded to the destruction of cultural sites in Ukraine between 2022 and 2025. The theoretical framework used is cultural heritage to understand the importance of protecting cultural heritage, as well as the theory of international organisation implementation (Joachim et al., 2007) to explain the concrete efforts made in the context of armed conflict. The method used is descriptive qualitative with literature review. The research results show that UNESCO uses two approaches, namely normative (authority and legitimacy) and management (monitoring, capacity building, and problem solving). Normatively, UNESCO establishes the status of World Heritage in Danger, Enhanced Protection, and Blue Shield marking to strengthen awareness and the international legal basis. From a management perspective, UNESCO conducts monitoring in collaboration with UNITAR UNOSAT and the Executive Board, implements capacity building with ICCROM, the Getty Conservation Institute, HEART, and the Smithsonian SCRI, and carries out problem-solving through ICCROM FAR workshops, the Maidan Museum, HERI, UNESCO/ICOMOS expert missions, and international conferences. These efforts have resulted in risk assessments, digital documentation, and medium- and long-term recovery action plans. Both approaches underscore that UNESCO is not only establishing symbolic norms but also implementing concrete technical actions to ensure the sustainability of cultural heritage amid conflict.

Keywords: UNESCO, Ukraine, Cultural Heritage, International Organisation, Normative Approach, Management Approach.

Abstrak

Konflik bersenjata tidak hanya mengancam nyawa manusia, tetapi juga merusak infrastruktur dan warisan budaya sebagai identitas kolektif suatu bangsa. Invasi Rusia ke Ukraina menyebabkan kerusakan ratusan situs budaya yang memiliki nilai sejarah, keagamaan, dan sosial. Sebagai badan PBB yang berwenang melindungi warisan budaya, UNESCO bertindak untuk mencegah kerusakan lebih lanjut, mendokumentasikan situs terdampak, dan menggalang dukungan internasional bagi upaya restorasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana UNESCO merespons perusakan situs budaya di Ukraina pada 2022–2025. Kerangka teori yang digunakan adalah *cultural heritage* untuk memahami pentingnya perlindungan warisan budaya, serta teori implementasi organisasi internasional (Joachim et al., 2007) guna menjelaskan upaya konkret yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan UNESCO menggunakan dua pendekatan, yaitu *normative (authority dan legitimacy)* serta *management (monitoring, capacity building, dan problem solving)*. Secara *normative*, UNESCO menetapkan status *World Heritage in Danger*, *Enhanced Protection*, dan penandaan *Blue Shield* untuk memperkuat kesadaran serta dasar hukum internasional. Secara *management*, UNESCO melakukan *monitoring* bersama UNITAR UNOSAT dan Dewan Eksekutif,

melaksanakan *capacity building* bersama ICCROM, Getty Conservation Institute, HEART, dan Smithsonian SCRI, serta menjalankan *problem solving* melalui lokakarya FAR ICCROM, Maidan Museum, HERI, misi pakar UNESCO/ICOMOS, dan konferensi internasional. Upaya ini menghasilkan penilaian risiko, dokumentasi digital, serta rencana aksi pemulihan jangka menengah dan panjang. Kedua pendekatan ini menegaskan bahwa UNESCO tidak hanya membangun norma secara simbolis, tetapi juga melaksanakan tindakan teknis konkret demi menjaga keberlangsungan warisan budaya di tengah konflik.

Kata kunci: *UNESCO, Ukraina, Warisan Budaya, Organisasi Internasional, Normative Approach, Management Approach.*

PENDAHULUAN

Konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika kehidupan sosial, yang dapat berkembang dari skala kecil hingga besar, dengan intensitas yang bervariasi dari perselisihan ringan hingga perang berkepanjangan (Pratiwi, Harahab, & Madhani, 2022). Konflik dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial yang terjadi antara dua kelompok atau lebih, di mana salah satu pihak berupaya mengeliminasi atau melemahkan pihak lain akibat perbedaan tujuan, nilai, keterbatasan sumber daya, dan perbedaan kebutuhan individu, kelompok, atau sosial (Pratiwi, Harahab, & Madhani, 2022). Salah satu bentuk konflik paling destruktif adalah perang bersenjata skala penuh, yang dampaknya meluas jauh melampaui medan pertempuran. Invasi militer yang dilancarkan Rusia terhadap Ukraina sejak tanggal 24 Februari 2022 telah memicu serangkaian dampak destruktif yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Konflik bersenjata ini tidak hanya menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam dan menyebabkan kekacauan ekonomi berskala besar, tetapi juga secara fundamental menghancurkan infrastruktur sosial dan budaya yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat. Di antara berbagai sektor yang terdampak, warisan budaya menempati posisi yang sangat rentan. Dalam konteks hukum internasional, perusakan terhadap situs budaya dalam situasi konflik bersenjata, seperti yang terjadi di Ukraina akibat agresi militer Rusia, merupakan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan internasional yang mengatur perlindungan warisan budaya. Secara spesifik, Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Konflik Bersenjata mengatur kewajiban negara pihak untuk melindungi situs budaya dari ancaman kerusakan, baik dalam situasi damai maupun perang (UNESCO, 2020). Selain itu, Protokol Tambahan I (1977) Konvensi Jenewa 1949 secara tegas melarang penyerangan terhadap objek-objek budaya yang memiliki nilai sejarah, seni, pendidikan, atau keagamaan, termasuk melarang penggunaannya untuk kepentingan militer (ICRC, n.d.). Lebih lanjut, dalam aspek hukum pidana internasional, Statuta Roma 1998 yang menjadi dasar hukum bagi Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) menyatakan secara eksplisit dalam Pasal 8 ayat 2 (b) (ix) bahwa kerusakan yang disengaja terhadap bangunan atau monumen budaya yang dilindungi oleh hukum humaniter internasional dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang (ICC, 2021). Oleh karena itu, pelaku perusakan situs budaya, baik negara maupun individu, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum melalui beberapa mekanisme. Pertama, melalui Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) apabila unsur kejahatan perang terpenuhi dan yurisdiksi ICC berlaku. Kedua, melalui pengadilan nasional negara korban, seperti Ukraina, apabila pelaku dapat diadili secara langsung.

Di luar jalur yudisial, The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai organisasi internasional yang memiliki mandat perlindungan warisan budaya berdasarkan Konvensi Warisan Dunia 1972, meskipun tidak memiliki kewenangan memutus perkara hukum, tetap dapat memberikan kecaman internasional, mencabut status warisan dunia, atau mendorong pertanggungjawaban politik. Dengan demikian, perusakan situs budaya memiliki jalur penegakan hukum yang jelas, baik melalui lembaga internasional maupun mekanisme nasional. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, UNESCO mencatat banyak kerusakan situs warisan budaya di Ukraina dan menunjukkan adanya tren peningkatan kerusakan kumulatif terhadap situs-situs warisan budaya di Ukraina selama periode konflik dari 2022 hingga 2025, mencakup berbagai jenis aset budaya mulai dari situs keagamaan, bangunan bersejarah atau artistik, museum, monumen, perpustakaan, arsip, dan situs arkeologi. Sejak terjadinya serangan di 24 Februari 2022, data pada bulan Oktober 2022 mencatat adanya 207 kasus kerusakan (Euronews, 2022). Kategori yang paling banyak terdampak adalah situs keagamaan (88) dan bangunan bersejarah atau artistik (76). Hal ini mengindikasikan bahwa target awal dalam konflik banyak berkaitan dengan identitas budaya dan spiritual masyarakat Ukraina. Selain itu, kerusakan juga tercatat pada museum (15), monumen (18), dan perpustakaan (18), yang menunjukkan bahwa bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga institusi memori dan pendidikan ikut terdampak (Euronews, 2022). Kemudian pada Oktober 2023, tercatat adanya lonjakan signifikan kerusakan situs budaya di mana jumlah kerusakan meningkat drastis menjadi 326 kasus secara kumulatif (UNESCO, 2023). Hal ini menunjukkan penambahan lebih dari 100 kasus baru dalam satu tahun. Bangunan bersejarah/artistik (141) dan situs keagamaan (124) tetap menjadi kategori yang paling terdampak, memperkuat dugaan bahwa situs-situs bernilai simbolik tinggi menjadi target berulang. Jumlah museum yang rusak juga meningkat (28), dan arsip mulai terdokumentasi (1) sebagai korban kerusakan, yang menjadi alarm penting karena arsip merupakan sumber memori dokumenter nasional. Selanjutnya di bulan Mei 2024, menunjukan adanya pola kerusakan yang masih berlanjut dan semakin menyebar, di tahun tersebut kerusakan mencapai 375 kasus, yang menunjukkan bahwa meskipun laju peningkatannya tidak secepat tahun sebelumnya, kerusakan tetap meluas. Kerusakan terhadap bangunan bersejarah (172), situs keagamaan (137), museum (31), monumen (20) (UNESCO, 2024). Kerusakan terhadap perpustakaan (14) dan arsip (1) juga tetap terjadi, menandakan dampak konflik terhadap infrastruktur informasi dan dokumentasi budaya. Kemudian data terbaru Juni 2025 mendapati adanya titik tertinggi kerusakan yang terdokumentasi di mana total kerusakan mencapai 501 situs budaya, menandai kenaikan hampir dua kali lipat dari Oktober 2022. Ini menjadi bukti bahwa konflik telah menyebabkan degradasi sistematis terhadap warisan budaya Ukraina. Kategori paling terdampak adalah bangunan bersejarah/artistik (262) dan situs keagamaan (151) yang merupakan elemen inti dari identitas kota dan komunitas. Kerusakan museum meningkat menjadi (34), monumen (33), perpustakaan (18) dan yang paling mencolok, kerusakan terhadap situs arkeologi muncul untuk pertama kalinya (2 kasus), mengindikasikan bahwa konflik telah mencapai dan merusak situs-situs peninggalan sejarah yang sebelumnya mungkin terlindungi secara geografis (UNESCO, 2025). Pola perusakan yang sistematis ini secara tegas menunjukkan

bahwa konflik modern tidak lagi semata-mata menargetkan objek-objek strategis militer, melainkan juga secara sengaja mengincar simbol-simbol identitas kultural dan sejarah bersama suatu bangsa, sebagai upaya untuk menghapus eksistensi dan narasi historisnya.

Tabel 1. Data perkembangan kerusakan situs warisan budaya di Ukraina

Tahun/Periode	Total Kerusakan (Kumulatif)	Situs Keagamaan	Bangunan Bersejarah/ Artistik	Museum	Monumen	Perpustakaan	Arsip	Situs Arkeologi
2022: Oktober	207	88	76	15	18	10	-	-
2023: Oktober	326	124	141	28	19	13	1	-
2024: Mei	375	137	172	31	20	14	1	-
2025: Juni	501	151	262	34	33	18	1	2

Sumber: Diolah kembali oleh Penulis (UNESCO, 2022; UNESCO 2023; UNESCO 2024; UNESCO 2025)

Dalam hal ini, situs warisan budaya lebih dari objek fisik karena memegang peranan vital dalam fungsi sosial suatu masyarakat, khususnya dalam mengukuhkan dan mempertahankan identitas nasional yang menjadi perekat bangsa, membangun solidaritas sosial di tengah keberagaman, serta berperan sebagai instrumen krusial dalam proses rekonsiliasi pasca konflik (Shahnaz, 2017). Dalam suasana konflik bersenjata, situs-situs budaya seringkali sengaja dijadikan target serangan, bukan hanya karena nilai fisiknya, melainkan sebagai bentuk penghancuran simbolis terhadap eksistensi budaya pihak lawan, sebuah taktik yang telah diamati dalam berbagai konflik sepanjang sejarah.



Gambar 1. Perusakan salah satu pusat kebudayaan di Ukraina tahun 2022

Sumber: (Maxar Satellite Imagery Analysis via UNOSAT, 2022)

Dengan demikian, isu perlindungan warisan budaya di masa konflik melampaui dimensi kebudayaan semata, menyentuh ranah keadilan sosial dan hak asasi manusia yang fundamental (Asri, 2018). Menyadari urgensi ini, UNESCO, sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, memiliki mandat internasional yang jelas untuk melindungi warisan budaya melalui Konvensi Warisan Dunia 1972. Mandat ini memberikan landasan bagi UNESCO untuk melakukan berbagai tindakan guna menjaga dan memulihkan situs budaya yang memiliki nilai universal, baik melalui pemantauan, pendataan, pelatihan, kerja sama internasional, maupun bentuk respons non-yudisial lainnya. Di samping itu, UNESCO juga

turut mendukung pelaksanaan instrumen hukum internasional lainnya yang relevan, seperti Konvensi Den Haag 1954 yang secara khusus melindungi properti budaya dalam situasi konflik bersenjata (Kurnia, 2017). Namun demikian, upaya UNESCO dalam merespons kerusakan situs budaya lebih berfokus pada tindakan normatif dan manajerial, bukan penegakan hukum pidana. Kajian mengenai perlindungan warisan budaya selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum pidana internasional, seperti pertanggungjawaban individu atau negara melalui ICC. Namun, ruang pembahasan yang menyoroti upaya lembaga internasional, khususnya UNESCO, dalam merespons kerusakan situs budaya melalui langkah-langkah normatif dan manajerial masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada bagaimana UNESCO menjalankan mandatnya dalam merespons kerusakan situs budaya, khususnya dalam konteks konflik bersenjata di Ukraina.

Studi literatur terdahulu memberikan landasan penting bagi penelitian ini. Penelitian dari Okhrimenko (2022) berjudul *“Protection of Cultural Heritage During Wartime in Ukraine: Legislation and Practical Aspects of Implementation”* menggunakan kerangka hukum perlindungan budaya nasional dan menekankan pada pentingnya kolaborasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Ukraina memiliki kerangka hukum domestik yang relatif kuat, implementasinya menghadapi berbagai tantangan praktis di tengah konflik, sehingga dukungan dari organisasi internasional seperti UNESCO menjadi sangat krusial dalam aspek pelatihan teknis dan perlindungan operasional. Penelitian dari Kurnia (2017) berjudul *“Peranan UNESCO dalam Perlindungan Benda-Benda Bersejarah yang Hancur akibat Konflik Bersenjata (Studi Kasus di Suriah)”* menggunakan teori fungsi organisasi internasional berdasarkan Konvensi Den Haag 1954 dan Protokol II 1999. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa UNESCO lebih berperan sebagai fasilitator normatif dan teknis dalam merespons kerusakan situs budaya, bukan sebagai pelaksana koersif, sehingga kerjanya sangat bergantung pada kerja sama negara anggota dan mitra teknis lainnya. Sementara itu, penelitian dari Tsugorka et al. (2024) berjudul *“The Role of International Organizations in the Protection and Restoration of the Cultural Heritage of Ukraine in the Conditions of Armed Aggression”* menggunakan pendekatan institusional dan kebijakan publik untuk melihat peran organisasi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNESCO berperan aktif dalam aspek pendanaan, penguatan kelembagaan, dan dukungan hukum bagi pemulihan budaya Ukraina melalui kerja sama lintas sektor. Ketiga studi ini menjadi pijakan utama dalam menelaah bagaimana UNESCO dalam merespons kerusakan situs warisan budaya di Ukraina.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai upaya konkret organisasi internasional, khususnya UNESCO, dalam menghadapi situasi darurat budaya yang kompleks dan dinamis. Kontribusi ini diharapkan dapat memperkaya literatur yang sudah ada dalam bidang hubungan internasional, budaya, sosial, dan bidang lain yang relevan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah nasional, lembaga non-pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan terkait agar dapat digunakan untuk merancang strategi penanganan dan pengimplementasian kerusakan warisan budaya yang lebih kolaboratif, terintegrasi, serta

berorientasi jangka panjang dalam menghadapi dampak konflik bersenjata di masa mendatang.

TINJAUAN PUSTAKA

Cultural Heritage

Konsep *cultural heritage* digunakan dalam penelitian ini untuk memahami esensi, nilai, dan posisi strategis warisan budaya, khususnya dalam konteks konflik bersenjata (Smith, 2020). Warisan budaya tidak hanya dipahami sebagai artefak fisik yang diwariskan dari masa lalu, melainkan merupakan konstruksi sosial yang aktif dibentuk melalui proses seleksi, pemaknaan, dan legitimasi oleh masyarakat dan aktor institusional (Smith, 2020). Menurut Abdillah (2020), yang mengutip Zainal dan Saebeni (2014), *cultural heritage* dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan nonmaterial. Kebudayaan material merujuk pada segala hasil ciptaan masyarakat yang bersifat konkret, termasuk artefak yang ditemukan melalui penggalian arkeologi. Sementara itu, kebudayaan nonmaterial mencakup bentuk budaya yang bersifat abstrak dan diwariskan secara turun-temurun, seperti dongeng, cerita rakyat, adat istiadat, serta tarian tradisional.

Pelindungan dan pelestarian *cultural heritage* dapat dilakukan melalui kerangka hukum, konservasi teknis, partisipasi masyarakat, dan kerja sama internasional. Aspek hukum dilakukan melalui peraturan nasional maupun konvensi internasional, seperti Konvensi Den Haag 1954 yang menetapkan standar perlindungan terhadap nilai budaya (Hidayat, Setiyono, & Dwiwarno, 2017). Di sisi lain, upaya konservasi mencakup kegiatan restorasi, dokumentasi, serta pemanfaatan teknologi untuk menjaga kondisi dan keberlanjutan warisan, baik fisik maupun tak benda (Szczepanowska, 2012).

Selain aspek hukum dan konservasi, pelibatan masyarakat juga menjadi bagian penting dalam pelestarian *cultural heritage*, karena nilai budaya diwariskan melalui praktik, pendidikan, dan keterlibatan aktif komunitas. Di samping itu, kerja sama antarnegara dan peran organisasi internasional turut memperkuat upaya perlindungan melalui dukungan teknis, regulasi global, dan pertukaran keahlian lintas batas (Labadi, 2013).

Implementasi Organisasi Internasional

Penelitian ini mengadopsi kerangka teori implementasi organisasi internasional yang dikemukakan oleh Joachim, Reinalda, dan Verbeek (2007), yang membagi peran organisasi internasional dalam pelaksanaan kebijakan menjadi tiga pendekatan utama: *enforcement*, *management*, dan *normative*.

Pendekatan *enforcement* memposisikan organisasi internasional sebagai penegak norma yang berfungsi melalui mekanisme sanksi, tekanan hukum, dan pemantauan kepatuhan yang ketat. Sementara itu, *normative approach* mengandalkan otoritas moral, pembentukan hingga penyebaran norma, serta proses argumentatif untuk mempengaruhi perilaku negara anggota. Terakhir, *management approach* memandang kegagalan implementasi bukan disebabkan oleh sikap pembangkangan, melainkan karena keterbatasan kapasitas administratif, kekurangan sumber daya teknis, atau ketidakjelasan dalam kebijakan. (Joachim et al., 2007). Dalam pendekatan ini, organisasi internasional bertindak

sebagai fasilitator melalui kerja sama teknis, konsultasi kebijakan, dan dukungan kelembagaan.

Penelitian ini secara khusus berfokus pada dua pendekatan, yaitu *normative approach* dan *management approach*, karena keduanya merepresentasikan secara relevan karakter dan bentuk respons organisasi internasional terhadap isu kerusakan situs budaya dalam situasi konflik. *Normative approach* dipilih karena organisasi internasional kerap menggunakan otoritas normatifnya dalam merespons kerusakan warisan budaya, khususnya dalam konteks pelanggaran hukum internasional. Pendekatan ini mencakup dua bentuk utama, yaitu *authority* (tindakan menegaskan kembali norma dan kewajiban hukum internasional melalui otoritas simbolik maupun legal) dan *legitimacy* (upaya membangun pengakuan moral dan dukungan internasional melalui penyebaran nilai-nilai universal serta simbol-simbol normatif) (Joachim *et al.*, 2007).

Sementara itu, *management approach* juga relevan karena sebagian besar respons organisasi internasional terhadap kerusakan situs budaya bersifat non-koersif, berbasis dukungan teknis, dan mengutamakan kerja sama multilateral. Pendekatan ini dapat diidentifikasi dalam tiga bentuk utama, yaitu *monitoring* (pemantauan kerusakan melalui berbagai instrumen seperti citra satelit, laporan lapangan, dan evaluasi berkala), *capacity building* (pelatihan teknis, penguatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan kelembagaan lokal yang relevan), serta *problem solving* (penyusunan ulang rencana konservasi, pemberian rekomendasi teknis, dan pelaksanaan program pemulihan situs budaya) (Joachim *et al.*, 2007).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk digunakan dalam analisis upaya UNESCO dalam merespons kerusakan situs warisan budaya di Ukraina. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan terkait dengan respons UNESCO meliputi konteks, proses, hingga interaksi yang terjadi di mana ini sesuai untuk mengeksplorasi fenomena sosial-politik yang kompleks (Yin, 2018). Selain itu, peneliti secara sistematis meninjau dan menganalisis berbagai dokumen dan publikasi relevan, sebagai metode pengumpulan data tanpa berinteraksi langsung dengan subjek penelitian (Sugiyono, 2018). Data tersebut dikumpulkan melalui *website* resmi UNESCO, laporan resmi, artikel jurnal, media, dan sumber lain yang kredibel dan relevan dengan topik penelitian. Penelitian ini menetapkan rentang waktu analisis dimulai dari tahun 2022 sebagai titik awal krusial didasari oleh peristiwa penyerangan pada 24 Februari 2022, di mana invasi skala penuh oleh Federasi Rusia ke Ukraina secara dramatis memicu gelombang kerusakan masif terhadap kekayaan warisan budaya di seluruh negeri (UNESCO, 2025). Peristiwa ini secara langsung menuntut respons darurat dan terkoordinasi dari komunitas internasional, termasuk peran vital UNESCO dalam upaya awal perlindungan. Sementara itu, Juni 2025 menjadi batas akhir karena mencerminkan perkembangan paling mutakhir dalam respons UNESCO terhadap kerusakan situs budaya akibat konflik bersenjata di Ukraina seperti peresmian lembaga budaya nasional di Ukraina hingga perkembangan kerusakan jumlah situs budaya yang meningkat. Dengan demikian, rentang waktu ini memungkinkan analisis yang holistik

terhadap evolusi respon UNESCO, mulai dari tindakan darurat yang bersifat reaktif di awal konflik hingga perencanaan strategis untuk pemulihan dan pembangunan kembali warisan budaya Ukraina yang berkelanjutan.

Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yang terdiri dari tiga tahap utama mulai dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2018). Pertama yaitu reduksi data, di mana peneliti membaca, mengidentifikasi, dan menyaring informasi yang relevan dari seluruh dokumen, kemudian memfokuskan pada data yang secara langsung menjawab pertanyaan penelitian dan mendukung kerangka teoritis. Selanjutnya, pada tahap penyajian data, informasi yang telah direduksi diorganisir ke dalam bentuk yang sistematis, seperti kategori tematik atau narasi deskriptif, untuk memudahkan identifikasi pola dan tren. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, di mana peneliti menginterpretasikan pola dan tema yang muncul dari data untuk merumuskan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana UNESCO merespons kerusakan situs warisan budaya di Ukraina pada periode yang telah ditetapkan. Kesimpulan ini didukung oleh bukti-bukti kuat yang ditemukan selama proses analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Normative Approach: Authority dan Legitimacy

Dalam menganalisis respons UNESCO terhadap kerusakan situs budaya di Ukraina, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menyoroti bagaimana UNESCO mengandalkan otoritas simbolik dan legitimasi moral dalam menegaskan pentingnya perlindungan warisan budaya di tengah konflik bersenjata. Pendekatan ini mencakup dua dimensi utama: *authority*, yang tercermin melalui tindakan seperti penyampaian pernyataan resmi dari Direktur Jenderal UNESCO dan penetapan situs budaya Ukraina ke dalam daftar *World Heritage in Danger*; serta *legitimacy*, yang terlihat dari upaya membangun pengakuan moral global melalui penempatan simbol *Blue Shield* pada situs budaya yang terdampak. Kedua dimensi ini mencerminkan upaya normatif UNESCO yang menekankan penguatan norma dan kesadaran internasional, meskipun tidak disertai kekuatan koersif.

Authority

Dalam konteks *authority*, UNESCO menjalankan otoritas normatifnya untuk menegaskan urgensi perlindungan warisan budaya dalam situasi konflik bersenjata. Otoritas ini bersumber dari kerangka hukum internasional yang telah diratifikasi negara anggota, terutama Konvensi Den Haag 1954 dan Konvensi Warisan Dunia 1972. Sebagai badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memiliki mandat di bidang kebudayaan, UNESCO memiliki kapasitas simbolik dan institusional untuk mengingatkan negara-negara akan kewajiban hukum internasional mereka dalam melindungi warisan budaya. Bukti nyata dari pelaksanaan otoritas ini terlihat pada pernyataan resmi Direktur Jenderal UNESCO pada 8 Maret 2022, yang mengecam serangan terhadap situs budaya di Ukraina dan menyerukan penghormatan terhadap instrumen hukum internasional.

Selain itu, tindakan penetapan situs St. Sophia Cathedral dan Historic Centre of Lviv ke dalam daftar *World Heritage in Danger* pada tahun 2023 juga mencerminkan otoritas prosedural UNESCO. Keputusan tersebut, yang dilakukan oleh Komite Warisan Dunia, menunjukkan kapasitas UNESCO dalam menetapkan status perlindungan terhadap situs budaya berdasarkan tingkat ancaman yang dihadapinya. Penetapan ini, selain sebagai pengakuan atas ancaman nyata, juga berfungsi sebagai alat normatif yang kuat, yang menarik perhatian internasional dan menandakan tanggung jawab bersama untuk pelestariannya. Kemudian, pada Desember 2024, UNESCO meningkatkan perlindungan hukum untuk situs-situs tertentu dengan memberikan *Enhanced Protection* di bawah Protokol Kedua Konvensi Den Haag (1999) kepada Museum Sastra Odesa dan Monumen Babyn Yar (UNESCO, 2023). Langkah ini, terutama untuk Babyn Yar Memorial, sebuah situs yang memiliki signifikansi sejarah dan budaya yang mendalam, menggarisbawahi pelanggaran terhadap situs-situs tersebut sebagai potensi kejahatan perang, yang memperkuat dasar hukum untuk pertanggungjawaban.

Legitimacy

Dalam konteks *legitimacy*, UNESCO membangun pengakuan moral dan simbolik melalui penguatan norma hukum internasional dan penyebaran nilai-nilai budaya universal. Legitimasi ini tidak hanya ditopang oleh otoritas formal yang dimiliki, tetapi juga oleh kepercayaan komunitas internasional terhadap nilai-nilai yang diperjuangkan yakni pelestarian warisan budaya sebagai bagian dari identitas kolektif umat manusia. Bukti nyata dari upaya legitimasi normatif yang dijalankan UNESCO yaitu pada tahun 2023 UNESCO tercatat telah menandai lebih dari 300 situs budaya di Odesa dengan simbol *Blue Shield* (UNESCO World Heritage Centre, 2024). Tindakan ini merujuk pada ketentuan Konvensi Den Haag 1954, di mana simbol *Blue Shield* berfungsi sebagai tanda perlindungan terhadap objek kebudayaan dalam situasi konflik bersenjata. Meskipun tidak menjamin perlindungan fisik, kehadiran simbol tersebut berperan sebagai pengingat moral yang memperkuat norma internasional serta mempertegas posisi UNESCO sebagai penjaga etika dan nilai global di tengah krisis kemanusiaan.



Gambar 2. Penandaan *Blue Shield* di salah satu situs budaya Ukraina

Sumber: (UNESCO, 2022)

Management Approach: Monitoring, Capacity Building, dan Problem Solving

Perlindungan warisan budaya dalam konflik tidak hanya menyangkut pelestarian artefak fisik, tetapi juga menjaga identitas kolektif dan memori sosial yang melekat padanya (Smith, 2020). Dalam situasi seperti ini, warisan budaya menjadi isu kemanusiaan dan politik yang strategis. Untuk menganalisis upaya UNESCO dalam merespons kerusakan situs budaya di Ukraina, digunakan teori *International Organizations and Implementation* menggunakan pendekatan manajerial melalui *monitoring, capacity building* dan *problem solving*.

Monitoring

Dinamika konflik Ukraina-Rusia tidak hanya mengganggu stabilitas eksternal seperti ekonomi dan politik dunia. Jika dilihat dalam dampak yang dirasakan secara internal, Ukraina mendapati kerusakan situs budaya akibat konflik yang terjadi antara Ukraina-Rusia. Dalam menghadapi dampak yang terjadi di Ukraina, UNESCO berperan penting sebagai organisasi internasional dibawah naungan PBB yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya secara global dengan tujuan untuk melanggengkan warisan budaya tersebut hingga dapat diakses ataupun dinikmati generasi berikutnya (UNESCO, 2025). Sebagai bentuk pertanggungjawaban UNESCO sebagai organisasi internasional yang memiliki keterkaitan dengan perlindungan warisan budaya, UNESCO melakukan monitoring untuk memantau kondisi dan perkembangan dampak konflik tersebut untuk menciptakan alternatif dan solusi dari dampak konflik yang terjadi.



Gambar 3. UNESCO mengumpulkan personel militer, budaya, dan peradilan untuk pendataan dan perlindungan cagar budaya

Sumber: (UNESCO, 2024)

1. Pemantauan/*Monitoring*

Dalam upaya pemantauan, UNESCO bekerja sama dengan UNOSAT. Kolaborasi ini dilakukan melalui verifikasi situs dengan menggunakan citra satelit. UNOSAT merupakan organisasi yang berada dibawah naungan UNITAR. UNOSAT merupakan badan yang menyediakan alat analisis menggunakan satelit (UNOSAT, 2025). Kolaborasi yang dilakukan UNESCO bersama dengan UNITAR-UNOSAT menciptakan platform

untuk memantau situs-situs apa saja yang dikategorikan rusak. Platform tersebut dapat menilai apakah situs tersebut rusak atau tidak yang kemudian akan diverifikasi oleh UNESCO apabila situs tersebut dinyatakan rusak. Terlebih khususnya, UNOSAT membantu UNESCO dalam melakukan *monitoring*, verifikasi, dan pendataan terkait kerusakan properti budaya dan kolaborasi UNESCO bersama dengan UNOSAT membantu pulihnya kembali properti budaya yang telah rusak (UNESCO, 2023).



Gambar 4. UNESCO Melakukan Pemindaian 3D Bangunan-Bangunan Bersejarah di L'viv

Sumber: (Action Plan for Culture in Ukraine, 2024)

2. Laporan Lapangan

UNESCO melaporkan secara berkala mengenai kerusakan warisan budaya kepada publik ataupun melalui koordinasi berkali melalui Dewan Eksekutif UNESCO. Awalnya, UNESCO melaporkan bahwa terdapat 29 situs keagamaan, 16 gedung bersejarah, 4 museum dan 4 monumen yang mengalami kerusakan pada tahun 2022 (Antarnews, 2022). Seiring dengan berjalannya waktu melalui upaya pemantauan dan kolaborasi yang dilakukan bersama UNOSAT jumlah laporan terus bertambah.

Pada tahun 2023 tepat pada 31 Oktober 2023, terdapat 326 situs yang telah diverifikasi UNESCO sejak 24 Februari 2024. Adapun situs-situs tersebut adalah 124 situs keagamaan, 141 bangunan bersejarah ataupun artistik, 28 museum, 19 monumen, 13 perpustakaan, dan 1 arsip (UNESCO, 2023). Pada Juni 2025, UNESCO mengkonfirmasi mengenai informasi terbaru terkait kerusakan situs budaya yang berdampak di Ukraina akibat perang Rusia-Ukraina. Per tanggal 25 Juni 2025, terdapat 501 situs yang mengalami kerusakan. Adapun situs-situs tersebut adalah 141 situs keagamaan, 262 bangunan bersejarah ataupun artistik, 34 museum, 33 monumen, 18 perpustakaan, dan 2 arsip (Larcan, 2025).

3. Evaluasi dan koordinasi berkala melalui Dewan Eksekutif UNESCO

Sejak memuncaknya konflik Rusia-Ukraina, UNESCO dengan sigap menanggapi permasalahan yang terjadi di Ukraina terutama dalam bidang yang menjadi perhatian mereka seperti ilmu pengetahuan, budaya, dan pendidikan. *Monitoring* yang dilakukan dalam forum bersama dengan Dewan Eksekutif UNESCO sejak sesi ke-215 yang dilaksanakan di Paris tanggal 5 Oktober - 9 Oktober 2022 hingga forum yang paling terbaru dilaksanakan UNESCO pada sesi ke-221 di Paris pada tanggal 2 April - 17 April

2025. Sehingga terhitung hingga pertemuan ke-215 hingga ke-221 terdapat 6 sesi pertemuan yang membahas mengenai dampak konflik di Ukraina.

Monitoring yang dilakukan melalui Dewan Eksekutif UNESCO secara umum disampaikan dengan narasi yang sama pada setiap sesinya. Dewan Eksekutif berfokus penyampaian apresiasi terhadap tindakan dan upaya diluar *monitoring* pada forum bersama Dewan Eksekutif. Selain itu, Dewan Eksekutif juga meminta kepada negara anggota untuk turut memberikan bantuan secara sukarela kepada Ukraina. Dalam setiap bulir terakhir sesi pembahasan mengenai kondisi Ukraina, Dewan Eksekutif meminta Direktur Jenderal UNESCO untuk menyampaikan laporan pada sesi pertemuan selanjutnya seperti pada sesi ke-221 butir ke .. disampaikan,

“Also invites the Director-General to hold an information meeting on the implementation of UNESCO’s emergency assistance programme for Ukraine prior to its 222nd session and to report to it on the subject at its 222nd session.” (UNESCO, 2025).

Meskipun terdapat beberapa narasi yang sama terdapat beberapa narasi berbeda yang menjadi intisari dari pertemuan *monitoring* bersama dengan Dewan Eksekutif. Sejak tahun 2022, UNESCO tidak berhenti melakukan *monitoring* setiap tahunnya. Bahkan, dalam satu tahun setidaknya terdapat satu kali pertemuan bersama Dewan Eksekutif yang membahas mengenai dampak konflik yang dialami Ukraina. Proses dan perkembangan yang dilakukan bersama Dewan Eksekutif dideskripsikan secara rinci melalui tabel berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Pertemuan Bersama Dewan Eksekutif UNESCO

No	Lokasi/Tanggal Pertemuan	Intisari Pertemuan
1	Paris/25-19 Oktober 2022	Mengapresiasi upaya dan langkah cepat yang dilakukan UNESCO untuk melindungi bidang-bidang UNESCO yang terkena dampak akibat konflik Rusia-Ukraina.
2	Paris/10-24 Mei 2023	Mengapresiasi langkah UNESCO dalam penempatan Petugas Hubungan UNESCO di Kyiv, Ibu Kota Ukraina.
3	Paris/4-11 Oktober 2023	Menegaskan kepada Direktur Jenderal UNESCO untuk memberikan perhatian penuh terhadap kerusakan Bendungan Kakhovka yang mengalami kerusakan akibat konflik Rusia-Ukraina. Bendungan Kakhovka memang tidak masuk kedalam daftar situs yang menjadi warisan budaya Ukraina. Tetapi, karena posisinya yang strategis terhadap situs budaya lainnya mengkhawatirkan dan harus menjadi perhatian karena kerusakan bendungan Kakhovka mengakibatkan banjir dan berdampak pada sektor

		ekonomi dan lingkungan. Secara lebih dalam, berdampak pada keamanan air dan keanekaragaman hayati.
4	Paris/13-27 Maret 2024	Dewan Eksekutif mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh UNESCO. Meskipun demikian, Dewan Eksekutif meminta peningkatan kapasitas kantor UNESCO di Kyiv untuk tindakan <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalah yang lebih cepat.
5	Paris/9-23 Oktober 2024	Dewan Eksekutif menyampaikan apresiasi terhadap monitoring berkelanjutan yang dilakukan oleh UNESCO terkait Bendungan Kakhovka yang ditandai dengan rencana aksi (action plan) untuk menangani dampak lingkungan termasuk keanekaragaman hayati.
6	Paris/2-17 April 2024	Dalam sesi ini, tidak terdapat hal-hal spesifik yang disampaikan oleh Dewan Eksekutif. Mereka hanya mengulang kembali dan meminta untuk melakukan laporan pada pertemuan selanjutnya pada sesi ke-222 yang belum terlaksana hingga saat ini.

Capacity Building

Capacity building merupakan bagian dari pendekatan manajerial OI yang berfokus pada penguatan kapasitas aktor lokal melalui pelatihan, transfer pengetahuan, dan peningkatan keterampilan teknis guna mendukung pelestarian situs budaya secara berkelanjutan (Joachim et al., 2007). Menurut strategi World Heritage and Capacity Building, *capacity building* didefinisikan sebagai proses untuk membangun kemampuan individu, organisasi, maupun masyarakat agar mampu melaksanakan fungsi, menyelesaikan masalah, dan mencapai tujuan secara berkelanjutan. (UNESCO WHC, 2018). Di samping itu, pada kajian ini *management approach* menjelaskan bahwa *capacity building* dapat dilihat dari 3 bagian penting yaitu berupa pelatihan teknis, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan kelembagaan lokal dalam yang juga di perkuat oleh UNESCO melalui beberapa kolaborasi yang dapat membantu Ukraina dalam merespon masalah ini:

1. Pelatihan Teknis

Pelatihan teknis merupakan bentuk *capacity building* yang berfokus pada peningkatan keterampilan praktis para profesional di bidang tertentu. Dalam konteks pelestarian warisan budaya, pelatihan teknis sangat penting untuk membekali para pelaku budaya dengan kemampuan operasional dalam menggunakan alat dan teknologi mutakhir seperti citra satelit, sistem informasi geografis (GIS), dan aplikasi pelaporan digital untuk mendeteksi, memantau, dan merespons kerusakan situs budaya secara cepat dan efisien. Dalam hal ini ada beberapa kolaborasi UNESCO yang dapat membantu Ukraine dalam merespon masalah ini.

UNESCO dan UNOSAT/UNITAR bersama berkolaborasi untuk memfokuskan pelatihan berbasis teknologi citra satelit dan GIS kepada profesional warisan budaya Ukraina. Pelatihan dilakukan di Lviv (November 2023 dan Februari 2025), termasuk simulasi penggunaan data satelit untuk pemantauan kerusakan, pemetaan arkeologi, serta pelaporan berbasis aplikasi lapangan. Keahlian teknis ini memperkuat kemampuan lokal dalam melakukan penilaian cepat secara mandiri dengan dukungan sistem pemantauan *real-time* UNOSAT dan UNESCO (UNOSAT-UNESCO, 2025). Selain itu Smithsonian Cultural Rescue Initiative (SCRI) juga membantu menggunakan teknologi satelit untuk mendokumentasikan kerusakan lebih dari 1.500 situs budaya, yang kemudian diintegrasikan dalam *Conflict Observatory*. Penggunaan teknologi ini menunjukkan bagaimana pelatihan teknis berbasis data spasial digunakan untuk mendukung pelestarian budaya dalam konteks konflik (Smithsonian Global, 2023).

2. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Penguatan kapasitas SDM dalam konteks warisan budaya mencakup peningkatan kompetensi personal, pemahaman etika pelestarian, serta pembentukan profesionalisme lintas bidang (arkeologi, konservasi, hukum budaya). Upaya ini sangat penting agar individu di berbagai tingkatan baik di lapangan maupun manajerial dapat mengambil keputusan yang tepat dalam situasi darurat budaya dan memiliki pemahaman mendalam terhadap standar internasional.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh UNESCO untuk menjadi dorongan penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Seperti UNESCO dan ICCROM yang bekerja sama mengadakan program pelatihan pada Agustus 2024 di Kyiv diikuti oleh 17 profesional budaya dari 10 wilayah Ukraina. Pelatihan ini dirancang untuk mengaplikasikan form penilaian kerusakan berdasarkan Konvensi Den Haag 1954 dan protokol tambahannya. Hasilnya adalah peningkatan pemahaman dan kemampuan SDM dalam melakukan penilaian risiko dengan metodologi yang seragam dan akuntabel secara hukum (UNESCO, 2024). Selanjutnya ada Smithsonian melalui HEART Program. Program Heritage Emergency and Response Training (HEART) ini adalah program pemberian pelatihan tanggap darurat budaya dan bantuan alat konservasi. Hal ini meningkatkan kesiapsiagaan SDM institusi budaya lokal dalam menyelamatkan koleksi di saat krisis, memperkuat kapasitas respons individu terhadap bencana budaya (SCRI HEART, 2024).

3. Pengembangan Kelembagaan Lokal yang Relevan

Capacity building juga harus mengutamakan penguatan kelembagaan lokal agar lebih tangguh dan berdaya dalam menghadapi kerusakan budaya. Ini mencakup pembentukan kerangka kerja regulatif, sistem pelaporan nasional, jaringan pemantauan, serta pembiayaan jangka panjang. Institusi lokal yang kuat dapat menjamin kesinambungan perlindungan budaya pasca konflik. Untuk menanggapi hal ini, UNESCO bekerja sama dengan beberapa mitra untuk mengembangkan kelembagaan lokal yang relevan. UNESCO dan ICCROM berkolaborasi bersama untuk menghasilkan kerangka kerja nasional yang seragam untuk pemantauan dan pelaporan kerusakan budaya. Ini mencerminkan penguatan kapasitas institusional, baik dari sisi metodologi maupun

legitimasi hukum intervensi (UNESCO, 2024). Selain itu Getty Conservation Institute (GCI) dan International Alliance for the protection of heritage in conflict area (ALIPH) juga turut berkontribusi dalam konflik ini. Dukungan dana US\$ 1 juta dari Getty membantu untuk perlindungan pada museum, arsip, dan koleksi pasca-konflik. Mereka juga berkontribusi dalam pengembangan alat digital konservasi dan manajemen situs yang menopang sistem kelembagaan pelestarian budaya di Ukraina (Getty-ALIPH, 2022). Selanjutnya Smithsonian SCRI dan CHML bersama berkolaborasi dalam memantau 28.000 situs dan mengintegrasikan data ke dalam *Conflict Observatory*, SCRI memperkuat mekanisme pemantauan lintas-lembaga, menjadikan data budaya sebagai instrumen kebijakan dan legitimasi tindakan pelestarian dalam sistem kelembagaan nasional Ukraina (Smithsonian Global, 2023).

Problem Solving

Problem solving merupakan pendekatan manajerial organisasi internasional (IO) yang berfokus pada penyelesaian masalah spesifik melalui penyusunan ulang rencana konservasi, pemberian rekomendasi teknis, dan pelaksanaan program pemulihan situs budaya (Joachim et al., 2007). Dalam permasalahan perusakan situs budaya Ukraina yang diakibatkan adanya konflik dengan Rusia UNESCO berusaha menangani dan melindungi situs warisan budaya Ukraina. Dimulai dengan mengidentifikasi kerusakan yang terjadi hingga upaya penanganan dan perlindungan kepada situs warisan budaya Ukraina.

1. Penyusunan Ulang Rencana Konservasi

Konflik yang berlangsung telah meningkatkan ancaman terhadap properti Warisan Dunia di Ukraina, terutama di kota-kota besar seperti Kyiv, L'viv, dan Odesa. Pada tanggal 25 Januari 2023, dalam sesi luar biasa ke-18 Komite Warisan Dunia, Pusat Bersejarah Odesa ditetapkan sebagai Warisan Dunia sekaligus masuk dalam Daftar Warisan Dunia dalam Bahaya karena dampak perang (UNESCO, 2023). Pada tanggal 6 Juli 2023, serangan misil merusak bangunan bersejarah di zona penyangga properti Warisan Dunia L'viv, sekitar 2 km dari komponen terdekat, yaitu ansambel St. Yuri. Pada tanggal 18 Maret 2022, Komite Perlindungan Properti Budaya dalam Situasi Konflik Bersenjata mendorong Ukraina untuk mengajukan status perlindungan yang ditingkatkan untuk semua properti Warisan Dunia, termasuk *L'viv – the Ensemble of the Historic Centre*.

Pertemuan baru dengan para profesional budaya Ukraina – pengelola situs Warisan Dunia, direktur museum, dan profesional yang bertanggung jawab atas warisan tidak bergerak dan bergerak dijadwalkan pada tanggal 9 dan 10 Maret 2022, untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak (UNESCO, 2022). Pertemuan ini, yang dihadiri oleh Wakil Menteri Kebudayaan dan Kebijakan Informasi Ukraina, bertujuan untuk memfasilitasi diskusi mengenai kondisi konservasi properti Warisan Dunia, ancaman dan kerusakan yang dihadapi, serta kebutuhan mendesak untuk melindungi situs-situs tersebut dari dampak perang. Isu utama yang diungkapkan oleh pengelola situs meliputi perlindungan struktur rentan, penyimpanan aman aset budaya bergerak, gangguan pada upaya restorasi akibat konflik, dan ketiadaan rencana kesiapsiagaan risiko sebelum

perang. UNESCO terus mendukung Kementerian Kebudayaan dan Kebijakan Informasi Ukraina dalam mengkoordinasikan inisiatif internasional untuk sektor budaya.

2. Pemberian Rekomendasi Teknis

ICCROM, melalui program *First Aid and Resilience for Cultural Heritage in Times of Crisis* (FAR), bekerja sama dengan Maidan Museum dan *Heritage Emergency Response Initiative* (HERI), mengadakan lokakarya daring pada 11-12 April 2022 untuk merumuskan metodologi penilaian kerusakan dan risiko warisan budaya Ukraina yang terancam konflik (ICCROM, 2022). Melibatkan lebih dari 77 profesional dari 14 wilayah, termasuk perwakilan Kementerian Kebudayaan Ukraina, ICOM, ICOMOS, Blue Shield, dan situs Warisan Dunia seperti Katedral Saint Sophia, lokakarya ini memberikan pelatihan darurat tentang penilaian risiko, pengembangan formulir penilaian kontekstual, dan dokumentasi kerusakan perang, sambil menekankan keselamatan personel di wilayah berbahaya.

3. Pelaksanaan Program Pemulihan Situs Budaya

Pada 26-30 Juli 2023, UNESCO, didukung Jepang, menyelenggarakan pelatihan intensif tatap muka bagi lebih dari 20 profesional warisan budaya dari delapan wilayah Ukraina, termasuk Odesa, Kyiv, dan L'viv, bekerja sama dengan ICOMOS, ICCROM, dan Kementerian Kebudayaan Ukraina (UNESCO, 2023). Pelatihan ini membekali peserta dengan keterampilan pengurangan risiko bencana, kesiapsiagaan darurat, dan dokumentasi konservasi melalui modul teori dan praktik, termasuk fotogrametri dan pemindaian laser, yang diterapkan di situs Warisan Dunia seperti Katedral Saint-Sophia di Kyiv. Sesi interaktif, seperti simulasi dan diskusi kelompok, melatih peserta dalam penilaian risiko multibahaya dan respons darurat untuk melindungi warisan budaya dari kerusakan akibat konflik.



Gambar 5. Pelatihan intensif tatap muka bagi lebih dari 20 profesional warisan budaya dari delapan wilayah Ukraina

Sumber: (UNESCO, 2024).

Pada April 2023, Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay, dalam kunjungannya ke Chernihiv bersama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, menegaskan komitmen UNESCO untuk mendukung rehabilitasi pusat bersejarah Chernihiv, yang terdampak parah serangan Rusia pada awal perang (UNESCO, 2024). Hal ini sebagai bagian dari lanskap perkotaan abad ke-9 hingga ke-13 yang masuk Daftar Tentatif Warisan Dunia UNESCO.

UNESCO mendukung otoritas Ukraina melalui lokakarya daring pada 2023 tentang metodologi pemulihan, diikuti misi pakar gabungan UNESCO/ICCROM pada Oktober 2023 untuk mengumpulkan data kerusakan, dan misi lima hari bersama ICOMOS pada 18-22 Maret 2024 untuk memberikan panduan metodologis bagi rencana pemulihan. Misi ini menilai belasan situs, termasuk katedral, gereja, gua kuno, dan Teater Drama yang rusak akibat serangan rudal 2023, serta menggunakan pemindaian 3D untuk mendokumentasikan morfologi perkotaan guna mendukung strategi pelestarian dan pemulihan jangka panjang.



Gambar 6. Kunjungan Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay
Sumber: (UNESCO, 2024).

Konferensi Internasional untuk Pemulihan Sektor Kebudayaan Ukraina di Vilnius, Lithuania, yang diprakarsai oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersama Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay, menghasilkan komitmen dari hampir 30 negara, termasuk Austria, Kanada, Jepang, dan Jerman, untuk mendukung seniman dan profesional budaya Ukraina serta melindungi dan memulihkan warisan budaya melalui koordinasi UNESCO (UNESCO, 2024). Konferensi ini menghasilkan rencana aksi jangka menengah dan panjang dengan enam bidang prioritas: pemantauan dan dokumentasi kerusakan warisan, tindakan pencegahan dan pemulihan, revitalisasi lembaga budaya, penguatan industri kreatif, peningkatan ketahanan budaya, dan transformasi digital sektor budaya, yang disusun UNESCO bersama otoritas Ukraina dan lebih dari 40 organisasi. Negara-negara peserta sepakat untuk menindaklanjuti implementasi rencana ini pada Konferensi Pemulihan Ukraina di Berlin pada 11-12 Juni.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa upaya UNESCO dalam merespons kerusakan situs warisan budaya di Ukraina menggabungkan *normative approach* (*authority, legitimacy*) dan *management approach* (*monitoring, capacity building, problem solving*) yang menegaskan bahwa UNESCO tidak hanya berperan secara simbolis, tetapi juga menjadi aktor krusial melalui tindakan yang memberikan tekanan moral serta bersifat operasional untuk melindungi warisan budaya. Secara normatif, UNESCO memanfaatkan otoritasnya dengan menetapkan status *World Heritage in Danger* dan memberikan *Enhanced Protection*, sekaligus memperkuat legitimasi moralnya melalui penandaan *Blue*

Shield pada situs-situs yang terancam sehingga tidak hanya meningkatkan kesadaran internasional tetapi juga memperkuat dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku perusakan sebagai kejahatan perang. Secara *management approach* dalam aspek *monitoring*, UNESCO berkolaborasi dengan UNITAR-UNOSAT dan Dewan Eksekutifnya dalam melakukan pemantauan terkoordinasi melalui citra satelit maupun laporan lapangan yang memberikan data akurat untuk perencanaan respons lebih lanjut. Dalam aspek *capacity building*, UNESCO bermitra dengan ICCROM, Getty Conservation Institute, dan Smithsonian Cultural Rescue Initiative untuk menyelenggarakan pelatihan teknis satelit/GIS, aplikasi lapangan, penguatan kapasitas SDM dengan Program Heritage Emergency and Response Training (HEART) dan pembentukan kerangka kelembagaan nasional untuk memastikan keberlanjutan upaya pemantauan serta pelaporan kerusakan di masa datang. Dalam aspek *problem solving*, UNESCO berinisiatif mengadakan lokakarya FAR-ICCRO yang bekerja sama dengan Maidan Museum dan Heritage Emergency Response Initiative (HERI), misi pakar UNESCO/ICOMOS, dan konferensi internasional di Vilnius dan Berlin yang telah menghasilkan metodologi penilaian risiko, dokumentasi digital, dan rencana aksi pemulihan jangka menengah hingga panjang bagi situs prioritas. Kedua pendekatan ini menunjukkan bahwa UNESCO tak hanya memperkuat norma secara simbolis, melainkan juga melaksanakan tindakan teknis untuk memastikan keberlangsungan perlindungan warisan budaya di tengah situasi konflik.

Saran

Meskipun upaya melalui *normative approach* dan *management approach* yang dilakukan UNESCO menegaskan menjadi aktor yang krusial dalam melindungi warisan budaya akibat konflik bersenjata, namun pendekatan ini perlu diimbangi dengan *enforcement approach*. Mengingat UNESCO tidak memiliki instrumen hukum atau otoritas yudisial yang memungkinkan untuk menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran, oleh sebab itu efektivitas perlindungan warisan budaya harus dilengkapi dengan mekanisme penegakan hukum yang dijalankan oleh aktor lain, seperti ICC untuk pelaku individu yang terbukti melakukan perusakan situs. Dengan demikian, menggabungkan ketiga pendekatan tersebut diharapkan akan menciptakan sistem perlindungan warisan budaya yang lebih komprehensif dan tangguh dalam menghadapi dinamika konflik bersenjata modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, J. (2020). Analisis Peran Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Desa Dalam Upaya Pengelolaan Pelestarian Cagar Budaya di Desa Kota Kapur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. *Jurnal Hukum Doctrinal*, 5(2), 187-191. doi:<https://jurnal.um-palembang.ac.id/doktrinal/article/view/2909>
- Asri, D. P. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Melalui World Heritage Centre UNESCO. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2), 256-276. doi:<https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss2.art3>

- Blake, J. (2000). On Defining the Cultural Heritage. *International and Comparative Law Quarterly*, 49(1), 61–85. doi:10.1017/S002058930006396X
- Cabinet of Ministers of Ukraine. (2022, 12 Desember). *Ukraine Received Generators from UNESCO*. Hämtat från Cabinet of Ministers of Ukraine: <https://www.kmu.gov.ua/en/news/mkip-ukraina-otrymala-heneratory-vid-iunesko>
- Euronews. (2022, Oktober 27). *UN keeping track of damage to Ukrainian cultural sites with before-and-after satellite images*. <https://www.euronews.com/my-europe/2022/10/27/un-keeping-track-of-damage-to-ukrainian-cultural-sites-with-before-and-after-satellite-ima>
- Hidayat, F., Setiyono, J., & Dwiwarno, N. (2017). Aspek-aspek hukum perlindungan situs budaya dalam perspektif hukum humaniter internasional (Studi kasus perusakan kota kuno Palmyra oleh ISIS). *Diponegoro Law Journal*, 6(1). <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- ICRC, (n.d). *Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)*, 8 June 1977. <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977>
- International Criminal Court. (2021). *Rome Statute of the International Criminal Court*. <https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/2024-05/Rome-Statute-eng.pdf>
- Joachim, J., Reinalda, B., & Verbeek, B. (2007). *International organizations and implementation: Enforcers, managers, authorities?* London: Routledge.
- Kurnia, P. A. (2017). Peranan United Nations Educational Scientific And Cultural Organization (Unesco) Dalam Perlindungan Benda-Benda Bersejarah Yang Hancur Akibat Konflik Bersenjata (Studi Kasus Perlindungan Benda-Benda Bersejarah Yang Hancur Akibat Konflik Bersenjata Di Suriah). *Diponegoro Law Journal*, 5(4), 1-10.
- Labadi, S. (2013). *UNESCO, cultural heritage, and outstanding universal value: Value-based analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions*. Lanham, MD: AltaMira Press.
- MCSC. (2025, 8 Maret). *The UNESCO project to preserve Jewish documentary heritage in Ukraine was launched in Kyiv*. Hämtat från mcsc: <https://mcsc.gov.ua/en/news/the-unesco-project-to-preserve-jewish-documentary-heritage-in-ukraine-was-launched-in-kyiv/>
- Museums Association. (2024, February). *UNESCO verifies damage to 343 cultural sites as war in Ukraine enters third year*. <https://www.museumsassociation.org/museums-journal/news/2024/02/unesco-verifies-damage-to-343-cultural-sites-as-war-in-ukraine-enters-third-year/>
- Okhrimenko, M. (2022). Protection of cultural heritage during wartime in Ukraine: Legislation and practical aspects of implementation. *Law and Society Review Ukraine*, 5(2), 88-103. doi:<https://doi.org/10.17721/2519-4801.2022.1.05>
- Pratiwi, A. D., Harahab, I., & Madhani, V. (2022). Konflik Dalam Masyarakat Global. *Education : Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(2), 80-88. doi:10.51903/education.v2i2.141

- Segerberg, A. (2024). To save a cultural heritage: Lessons from a volunteer network's support to Ukrainian cultural heritage institutions. *Alexandria*, 34(3), 118-125. doi:<https://doi.org/10.1177/09557490241230502>
- Shahnaz, M. P. (2017). Respons UNESCO terhadap Penghancuran Warisan Budaya Dunia di Suriah. *Journal of International Relations Diponegoro*, 3(4), 123-129. doi:<https://doi.org/10.14710/jirud.v3i4.17688>
- Shield., U. C. (den 15 September 2023). *Blue Shield International's Report Documents Putin's Potential Violations of Cultural Property Law*. Hämtat från uscbs: <https://uscbs.org/blue-shield-internationals-report-documents-putins-potential-violations-of-cultural-property-law/>
- Smith, L. (2020). *Uses of Heritage* (2nd uppl.). London: Routledge.
- Soloviova, A. (2025, 3 Maret). *Protecting cultural heritage during the war in Ukraine: legal responses and global consequences*. Hämtat från Euideas: <https://euideas.eui.eu/2025/03/04/protecting-cultural-heritage-during-the-war-in-ukraine-legal-responses-and-global-consequences/> den 3 Juli 2025
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Szczepanowska, H. M. (2012). *Conservation of cultural heritage: Key principles and approaches*. London: Routledge.
- Tsugorka, O., Byrkovych, T., Denysiyuk, Z., Kravchenko, A., Boyko, V., & Kotviakovskiy, Y. (2024). The role of international organizations in the protection and restoration of the cultural heritage of Ukraine in the conditions of armed aggression: Financial, economic and legal aspects. *Edelweiss Applied Science and Technology*, 8(6), 1430-1444. doi:10.55214/25768484.v8i6.2259
- UNESCO. (2025, 25 Juni). *Damage and victims: Rebuilding the foundations of peace in Ukraine*. <https://www.unesco.org/en/ukraine-war/damages-and-victims>
- UNESCO. (2022, Maret 8). *Endangered heritage in Ukraine: UNESCO reinforces protective measures*. UNESCO. <https://www.unesco.org/en/articles/endangered-heritage-ukraine-unesco-reinforces-protective-measures>
- UNESCO. (2023, Januari 25). *Historic Centre of Odesa inscribed on World Heritage List and List in Danger*. UNESCO. <https://whc.unesco.org/en/news/2469/>
- UNESCO. (2023, April 13). *Teaching and learning with living heritage in Ukraine*. UNESCO Intangible Cultural Heritage. <https://ich.unesco.org/en/news/teaching-and-learning-with-living-heritage-in-ukraine-13461>
- UNESCO. (2020). *The 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its two Protocols (1954 and 1999)*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <https://en.unesco.org/protecting-heritage/convention-and-protocols/1954-hague>
- UNESCO. (2023, Januari 20). *UNESCO trains professionals to fight against illicit trafficking of Ukrainian cultural property*. UNESCO. <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-trains-professionals-fight-against-illicit-trafficking-ukrainian-cultural-property>

- UNESCO. (2025, Juni 25). *Damaged cultural sites in Ukraine verified by UNESCO*. UNESCO. <https://www.unesco.org/en/articles/damaged-cultural-sites-ukraine-verified-unesco>
- UNESCO. (2025, Februari 11). *UNESCO opens a new national cultural institution in Ukraine*. UNESCO. <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-opens-new-national-cultural-institution-ukraine>
- UNITAR. (2025, Februari 28). *UNOSAT and UNESCO conduct advanced training on cultural heritage monitoring in Ukraine*. UNITAR. <https://unitar.org/about/news-stories/news/unosat-and-unesco-conduct-advanced-training-cultural-heritage-monitoring-ukraine>
- UNESCO World Heritage Centre. (2024). *State of Conservation: The Historic Centre of Odesa (Ukraine)*. UNESCO. <https://whc.unesco.org/en/soc/4529/>
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th uppl.). London: Sage Publications.

